

BAB II

KEADAAN YOGYAKARTA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945

A. Sekilas tentang keadaan Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang

1. Pendidikan

Kebijakan pendidikan Jepang selama tiga setengah tahun masa pendudukan mereka ditandai oleh tiga prinsip pokok: (1) pendidikan ditata kembali atas dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial. (2) pengaruh Belanda dihapuskan secara sistematis dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama. (3) semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk mengindoktrinasi¹ gagasan kemakmuran bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang.

Semua sekolah dasar ditata kembali menjadi pendidikan enam tahun, dengan kurikulum yang sama di desa dan di kota. Bahasa Belanda dilarang baik dalam mengajar maupun tulisan. Guru-guru harus mempelajari bahasa Jepang dalam kursus-kursus kilat dan kemudian harus mengajarkan di sekolah. Lagu-lagu Indonesia dan Jepang diajarkan di segenap kota dan desa di seluruh pulau Jawa.²

¹ Indoktrinasi adalah pemberian ajaran mengenai suatu faham atau doktrin. Lihat, W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 379.

² Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 286.

Perubahan-perubahan mengenai sistem pendidikan yang dilancarkan oleh pemerintah militer Jepang secara beruntun berhasil dalam menanamkan pengaruh terhadap masyarakat Jawa di Yogyakarta, terutama di kalangan orang muda. Dihapuskannya bahasa Belanda dari kurikulum sekolah-sekolah di kota mengakibatkan murid-murid desa tidak lagi merasa rendah diri. Kurikulum serta lagu-lagu Jepang dan Indonesia yang seragam dipelajari di semua sekolah dan dinyanyikan di pusat-pusat latihan gabungan pemuda semi militer sangat membantu hapusnya jarak sosial, dan menciptakan kesadaran akan kesamaan di kalangan para siswa dari semua kelas sosial dan dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.³

Kondisi pendidikan masyarakat Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang pada awalnya lebih baik dari pada masa pemerintahan Belanda. Tetapi, makin lama perkembangan pendidikan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dikembangkan untuk mencapai tujuan pelestarian kekuasaan pendudukan Jepang di Yogyakarta..

2. Sosial

Pada masa pendudukan Jepang keadaan sosial di daerah Yogyakarta sangat menyedihkan. Pemerintahan Jepang secara terang-terangan kurang memperhitungkan nilai-nilai sosial dan kultural penduduk pribumi. Daerah-daerah membentuk Panitia Penyerahan Romusha (PPR) yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusha berdasarkan laporan sementara atau daftar sementara. Penyerahan romusha ada yang karena kehendak sendiri

³ *Ibid*, hlm. 288.

untuk menjadi romusha tetapi ada juga yang karena paksaan. Putra-putra petani juga ada yang mendaftarkan diri sebagai Haiho, atau pembantu serdadu Jepang. Penyerahan padi kepada pemerintah tentara pendudukan mengakibatkan bertambahnya kesengsaraan rakyat. Tekanan untuk menjadi romusha di kota tidak begitu berat seperti di desa, meskipun juga terdapat kemelaratan dan kesengsaraan.⁴

Pada saat itu keadaan pegawai negeri sebagai kelas konsumen sangat menyedihkan, gajinya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa menjual barang-barang yang tadinya dikumpulkan pada waktu masih makmur. Mulai zaman Jepang hingga zaman Republik pegawai negeri tidak lagi mendapat fasilitas-fasilitas seperti di zaman lampau, karena adanya perbedaan di dalam politik dan pandangan hidup pemerintahan masing-masing.

Masuknya Jepang ke Yogyakarta telah menyebabkan ditutupnya tambang mangaan didesa kliripan. Setelah pertambangan itu dibuka kembali oleh Jepang, banyak dibutuhkan tenaga buruh. Kebutuhan tenaga buruh untuk pertambangan mangaan pada masa pendudukan Jepang ini sangat banyak dibanding dengan pada masa penjajahan Belanda. Pemberian upah yang sangat rendah, mengakibatkan timbulnya kemelaratan yang merajalela. Kesehatan mereka tidak terjamin. Tidak ada jaminan keamanan terhadap

⁴ *Ibid*, hlm. 45.

buruh yang sedang bekerja. Semua hasil-hasil tambang tersebut diangkut ke Jepang. Usaha Jepang ini berlangsung dari tahun 1942-1945.⁵

3. Ekonomi

Menjelang kedatangan balatentara Jepang di Yogyakarta, banyak terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh penduduk. Sasaran perampokan adalah toko-toko, gudang-gudang dan pabrik-pabrik. Keadaan ini menimbulkan kekacauan di lapangan ekonomi, di tambah pada masa itu pegawai pemerintah tidak menerima gaji dalam beberapa bulan. Banyak orang menjual barang-barangnya untuk ditukar dengan makanan, maka timbul perdagangan barang-barang bekas di sepanjang jalan. Harga-harga bahan makanan pokok seperti beras dan gula membumbung tinggi. Orang-orang mulai makan ketela sebagai pengganti beras.

Kenaikan harga ini kemudian ditindak tegas oleh tentara Jepang, tetapi ternyata kenaikan harga tersebut sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Kenaikan harga ini disebabkan jumlah barang-barang kebutuhan sangat terbatas, dan nilai uang merosot. Tentara membeli barang-barang bahan makanan sendiri dengan maksud untuk mempertahankan harga pasar dan menolong penduduk desa yang sudah menjual hasil tanamannya.⁶

⁵ Masjkuri, dkk. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Depdikbud, 1977, hlm. 291-293.

⁶ *Ibid*, hlm. 264.

Padi yang terkumpul harus dijual ke pabrik beras dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Keadaan ini hanya berlaku sementara, karena pabrik-pabrik padi kemudian tidak mau membayar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentara pendudukan Jepang, sehingga hal ini sangat merugikan petani. Memburuknya keadaan peperangan, membuat tindakan Jepang menjadi lebih kejam. Petani diwajibkan menyerahkan padi kepada pemerintah tanpa ganti kerugian. Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengadakan hubungan langsung dengan rakyat, tetapi selalu mempergunakan peraturan-peraturan. Kini pemerintah tentara pendudukan Jepang langsung berhubungan dengan petani, mereka keluar masuk desa sendiri. Sehingga kekejaman pemerintah Jepang langsung dirasakan oleh masyarakat desa.⁷

Tindakan pemerintahan Jepang yang sangat kejam di tambah kurangnya bahan makanan pakaian dan barang-barang lainnya selama perang menimbulkan ketidak puasan dari semua kalangan penduduk, terutama dikalangan rakyat jelata. Ketidakpuasan ini berangsur-angsur berkembang menjadi berkembang menjadi perasaan dendam terhadap pemerintah Jepang, dan seiring dengan merosotnya keadaan ekonomi akhirnya mejadi suatu kebencian. Rakyat menderita kelaparan sehingga banyak masyarakat yang meninggal.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 294

⁸ Selo Soemardjan, *loc. cit.*

B. Eksistensi Cina pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta

Jepang mulai mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942, dan hanya membutuhkan waktu satu minggu untuk memaksa pemerintah Hindia Belanda menyerah. Terjadi kerusuhan di berbagai tempat yang memaksa para pengusaha dan pedagang Cina memindahkan barang-barang simpanannya ke luar kota atau pedalaman. Golongan orang Cina banyak yang menjadi korban jarahan, baik harta maupun jiwa.⁹ Kerusuhan timbul dimana-mana, gedung-gedung besar, dan pabrik-pabrik Belanda dijarah oleh masyarakat yang tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di pedesaan. Oleh karena itu, Jepang segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Jepang segera melarang dan menumpas huru-hara yang sempat muncul. Terhadap aktivitas politik (termasuk komite-komite) dikeluarkan undang-undang yang melarang berdirinya segala bentuk organisasi politik demi kestabilan pemerintah Jepang di Jawa.¹⁰

⁹ Tiga slogan yang diteriakkan para perusuh dan perampok adalah: “kami disini untuk mengambil barang-barang mu!, kami mendapat perintah dari Jepang! Kalian para Cina sudah kaya! Kami miskin!; Usir Belanda!: Usir Cina...!!!” Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2004, hlm. 88.

¹⁰ Tindakan Jepang untuk memulihkan keamanan dalam waktu yang singkat, memberikan kesan yang mendalam terhadap sebagian golongan orang Cina karena bangsa Jepang dapat dianggap sebagai Dewa Penolong dari ancaman orang pribumi. Orang Cina selama ini merasa hubungan dengan orang pribumi cukup harmonis. Akan tetapi, pergantian pemerintahan orde pemerintahan memutarbalikan pandangan yang muncul karena status quo kolonial ini. Dikalangan orang Cina muncul pemikiran baru, bukan Jepang yang terutama ditakuti, melainkan bangsa Indonesia. Didi Kwartanada, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Penguasa Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 28.

Untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam komunitas orang Cina, Jepang menyebarkan agen-agen intelijennya. Agen ini menyebarkan propaganda Jepang untuk meredam suara-suara anti Jepang yang dilancarkan para pemimpin orang Cina. Selain itu, Jepang juga melakukan pencarian terhadap tokoh-tokoh pergerakan. Gerakan ini dikoordinasi oleh konsulat Jepang yang berpusat di Jakarta dan di bantu oleh orang-orang Cina yang berpihak kepada Jepang.

Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan milik Belanda mengalami kebangkrutan. Terjadi pembatasan perdagangan ekspor impor yang mengacaukan keseluruhan rantai perdagangan tingkat perantara. Orang Cina di Yogyakarta dari zaman kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang masih bekerja sebagai pedagang perantara. Tekanan pemerintah Jepang menyebabkan peranan orang Cina sebagai pedagang perantara mengalami kemunduran.¹¹

Secara umum, kebijakan politik pendudukan Jepang terhadap minoritas Cina di Jawa tidak dapat dilepaskan dari Panglima Tertinggi Tentara XVI, Letjen Imamura. Ada banyak pilihan politik Jepang yang akan diterapkan, tapi Imamura memilih jalan yang lebih lunak. Imamura berpendapat, jika minoritas Cina ditekan dengan kekerasan maka akan menimbulkan konflik baru. Lebih baik potensi yang ada pada penduduk Cina dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya perang.

¹¹ Ari Kurniawan, "Eksistensi Komunis Cina pada Masa Pendudukan Jepang di Yogyakarta (1942-1945)", *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2011, hlm. 53.

Demikianlah politik tersebut dijalankan dengan imbalan penghidupan kembali kebudayaan minoritas Cina. Jepang menerapkan politik “Cina tetap Cina”, dengan jalan pencinaan kembali golongan Cina. politik Jepang ini bisa bermakna ganda, ke dalam semakin memperkuat identitas Cina, ke luar semakin menjauhkan golongan peranakan dari budaya lokal. Imbalan itu sendiri membawa kemenangan bagi golongan totok.¹² Akibatnya kebijakan ini menimbulkan perpecahan bagi gerakan perlawanan Cina terhadap Jepang di Jawa. Propaganda Jepang telah berhasil, banyak orang Cina yang kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Jepang. Sebaliknya, mereka yang tetap konsisten, melanjutkan gerakan perlawanan.

Untuk mempermudah pengawasan pada komunitas Cina, Jepang mendirikan *Kakyo Han* yaitu kantor urusan Cina di setiap kota besar di Jawa yang berpusat di Jakarta. Tugas kantor ini mengawasi gerak masyarakat Cina, menyebarkan peraturan yang berkenan dengan Cina, dan menarik pajak dari penduduk Cina. kantor ini berada di bawah pengawasan langsung *Kempetai*.¹³

Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan Undang-Undang No. 7 tanggal 11 April 1942, dimana Jepang menggolongkan orang Cina sebagai bangsa asing sehingga wajib mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban yang

¹² Golongan totok ingin menunjukkan patriotismenya, sedangkan golongan peranakan mempunyai anggapan bahwa membendung agresi Jepang dengan jalan mengirim dana ke Cina adalah jalan yang lebih murah dan aman, dari pada melawan Jepang. Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa peranakan di Jawa 1917-1942*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, hlm. 60.

¹³ *Kempetai* adalah polisi militer angkatan darat Jepang yang memegang peranan penting dalam mengekang perlawanan dan mendisiplinkan rakyat Indonesia dan di Asia dengan tangan besi. Lihat, R. P. Suyono, *Seks dan kekerasan pada Zaman Kolonial*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 247.

dibebankan pada bangsa asing, salah satunya membayar pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah untuk laki-laki sejumlah 100 gulden dan untuk perempuan 50 gulden. Karena jumlah tersebut termasuk besar maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur bagi golongan Cina yang tidak mampu.

Jepang mendorong pedagang Indonesia untuk maju dalam bidang ekonomi. Jepang menjalin kerjasama dengan orang Cina semata-mata untuk alasan ekonomi, demi kemajuan perdagangan Jepang sendiri. Mereka didorong untuk bergabung dalam persatuan pedagang, yang berbentuk semacam koperasi. Organisasi ini dimaksudkan sebagai badan distribusi barang-barang kebutuhan dari pemerintah Jepang kepada konsumen. Di Yogyakarta terkenal KEI (Kemajuan Ekonomi Indonesia).¹⁴ Banyak pedagang Cina yang terdepak dari persaingan bisnis dengan pribumi. Misalnya di Yogyakarta, semula jatah distribusi barang adalah 75 %-25% untuk HCCH (Hua Chiao Chung Hui) dan KEI, akhirnya bisa menjadi 50%-50% untuk kedua belah pihak. Bila diperkotaan perekonomian Cina mulai terdesak, namun dipedesaan mereka masih menguasai penggilingan padi.¹⁵

Berbagai macam pungutan dikenakan terhadap golongan Cina. Ada pajak kekayaan, pajak bangsa asing, serta berbagai macam sumbangan lain. Bahkan sebagian biaya operasional tentara PETA oleh Jepang juga dibebankan pada

¹⁴ Didi Kwartanda, “Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, *Skripsi*, Yogyakarta: FIB UGM, 1997, hlm. 32.

¹⁵ Yudi Prasetyo, *Ekonomi Perdagangan Orang Cina di Kota Yogyakarta 1907-1954*, *Skripsi*, Yogyakarta: FIB UGM, hlm. 83.

golongan Cina. Selain itu, masyarakat Cina harus menanggung biaya operasional HCCH dan aneka ragam kegiatan (seperti olahraga, hiburan, dan sosial) yang diselenggarakannya. Pajak untuk golongan Cina yang tidak mampu juga ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat Cina. Hal yang memberatkan adalah bila ketua HCCH adalah seorang penjiilat Jepang dan bermaksud mencari muka. Misalnya, menyanggupi pengumpulan sejumlah uang yang cukup besar untuk pembelian pesawat terbang. Entah bagaimana caranya yang penting jumlah target tersebut harus dipenuhi.¹⁶

Selain eksploitasi dana, Jepang juga merekrut tenaga pemuda Cina untuk dilatih menjadi *Keibotai* (Korps Pertahanan Sipil Cina). Jepang menentukan kota jumlah pemuda Cina yang harus disediakan untuk dilatih. Tujuan Jepang mengadakan korps ini adalah melibatkan pemuda Cina dalam pertahanan Jawa dari kemungkinan serbuan Sekutu, walau tidak semua penduduk Jepang setuju dengan usaha ini. Golongan Cina juga terpecah pendapat dalam menanggapi adanya *Keibotai*. Di satu pihak, mereka melihat sebagai usaha Jepang untuk mengadu domba mereka dengan golongan pribumi. Di pihak lain, mereka melihat sebagai suatu kesempatan untuk berlatih dasar-dasar kemiliteran, seandainya kelak mereka dalam keadaan terdesak.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁷ Yudi Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 86.

Tabel I

Tabel Jumlah Kesatuan dan Anggota *Tokubetsukakyo Keibotai* di Jawa
(Agustus 1945)

No	Daerah	A	B
1	Banten	2	57
2	Jakarta	-	-
3	Bogor	3	509
4	Priangan	-	-
5	Cirebon	-	-
6	Pekalongan	-	-
7	Semarang	1	300
8	Pati	-	-
9	Banyumas	1	200
10	Kedu	8	457
11	Jogjakarta	1	100
12	Surakarta	5	160
13	Surabaya	5	5.135
14	Bojonegoro	6	222
15	Madiun	9	991
16	Kediri	18	1.185
17	Malang	4	2.493
18	Besuki	-	-

19	Madura	-	-
20	Kotapraja Jakarta	8	376
	Total	71	12. 185

Keterangan: A: Jumlah Kesatuan, B: Jumlah Anggota¹⁸

Pemerintah Jepang berusaha memanfaatkan segala sumber daya alam dan manusia yang ada di Hindia Belanda demi mencari keuntungan dari segi ekonomi serta mencari bantuan dalam menghadapi pasukan sekutu.¹⁹ Ketika Jepang menyerah pada sekutu di Perang Dunia II, situasi komunitas Cina di Yogyakarta memburuk. Rumah-rumah dan toko-toko mereka dibakar dan dirampok, orang-orang Cina diculik dan dibunuh oleh para Pribumi.²⁰

¹⁸ Didi Kwartanada, *op.cit.*, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

²⁰ Shirley Lie. (2006). Dilema Etnis Tionghoa di Indonesia, *Basis*, No. 03-04, Tahun ke-55, hlm. 14.